

# Kebudayaan dan Pembangunan Wilayah: Kasus Pulau Kangean

Abd. Latif Bustami\*

Tulisan ini tentang hakekat interaksi antara kebudayaan masyarakat Pulau Kangean dengan pilihan-pilihan penentuan pembangunan wilayah. Beberapa temuan penelitian menyatakan bahwa Pulau Kangean dinyatakan sebagai epigon kebudayaan Madura. Data penelitian saya menunjukkan bahwa Pulau Kangean memiliki kebudayaan berbeda dengan kebudayaan Madura. Pembangunan kepulauan diperlakukan sama dengan pembangunan di daratan sehingga sering timbul konflik-konflik. Penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan strategis sering bertentangan dengan tujuan semula. Di sisi lain, kehadiran warga yang bekerja di luar negeri (Malaysia) memberikan penguatan pada perluasan medan konflik. Di kalangan anak muda, LSM, dan warga terpelajar ada keinginan untuk mengelola aset-aset strategis untuk pembangunan di wilayahnya secara mandiri bahkan ada keinginan untuk mendirikan negara. Pulau Kangean sejak abad ke-19 sebagai penghasil kayu jati terbesar, peternakan ayam bekisar, dan tambang minyak yang bisa dijadikan modal untuk mendirikan negara. Pembangunan selama ini hanya menguntungkan wilayah daratan (*dereiden*), sedangkan wilayah kepulauan (*polo*) yang banyak mendatangkan devisa terabaikan bahkan diidentikkan dengan wilayah pembuangan. Alasan yang sering dikedepankan adalah aset Pulau Kangean yang diserahkan ke Pemda tidak sebanding dengan dengan hasil yang diterima oleh masyarakat. Berbagai keinginan ini perlu dianalisis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada otonomi kebudayaan lokal.

## Pendahuluan

Lokasi Pulau Kangean secara astronomis terletak  $115^{\circ} - 115^{\circ} 30'$  bujur timur,  $6^{\circ} 49' - 7^{\circ} 20'$  lintang utara. Secara administratif termasuk Kabupaten Sumenep Madura. Sebenarnya jarak Pulau Kangean ke Pulau Bali lebih dekat daripada ke Sumenep tetapi karena permintaan warga lebih memilih bergabung ke Sumenep walaupun jarak tempuhnya lebih jauh. Jarak dari Kangean ke Sumenep adalah 88 mil yang bisa ditempuh selama 12-14 jam sedangkan ke Pulau Bali hanya sekitar 4-6 jam. Di wilayah ini pembagian wilayah secara geografis dibagi dua yaitu daratan (*dereiden*) dan kepulauan (*polo*). Luas wilayah daratan adalah

---

\* Abd. Latif Bustami adalah Dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

1.147,24 km (57,40%) terdiri dari tujuh belas (17) kecamatan sedangkan kepulauan seluas 851,30 km (42,60%) meliputi 74 pulau (Sumenep dalam Angka, 1998). Kangean termasuk wilayah kepulauan (*polo*) dengan 28 desa dan memiliki enam buah (6) pulau berpenghuni dan empat belas buah pulau (14) tidak berpenghuni. Keempatbelas buah pulau itu adalah Saparea, Saketek, Bindena, Malang, Kunyit, Pangapos, Talage, Karanjengan, Sabiteng, Sako, Gili-Gili, Karanjeng, Karenteng, Tajjen. Luas wilayah ini adalah 460,96 km<sup>2</sup> dengan panjang 48 km dan lebarnya adalah 18 km. Jumlah penduduk sebesar 77.672 orang terdiri dari 37.555 (laki-laki) dan 40.117 perempuan. Rasio seks sebesar 93,61 dengan kepadatan penduduk 170,02 orang. (Kecamatan Arjesa dalam Angka, 1998).

### ***Dereden dan Polo***

Secara historis, Pulau Kangean merupakan wilayah kasultanan Sumenep yang dijadikan sebagai tempat pembuangan nara pidana dan lawan-lawan politik penguasa lokal. Sampai saat ini para pejabat yang ditempatkan di Pulau Kangean merasa dirinya dibuang, warga masyarakat mengidentikkan pengangkatan di kepulauan dengan kesalahan sehingga tingkat pelayanan menjadi tidak maksimal. Para pejabat sering berada di daratan dengan berbagai alasan. Di samping itu, lokasi pulau yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, interinsuler sering dijadikan sebagai tempat bajak laut (*lanun*). Cerita tentang *lanun* sering dinyatakan dan selalu dihubungkan dengan sejarah terjadinya perkampungan di perbukitan (*dera'*) dan pesisir (*paseser*). Di sini terdapat kue *lanun* yang berwarna hitam yang pada awalnya bertujuan untuk berani melawan *lanun*.

Konstruksi *dere*den sebagai pusat kekuasaan dan *polo* sebagai wilayah vasal menentukan cara pandang dan bertingkah laku. Orang *dere*den dikonstruksi lebih tinggi dari *oreng polo* dan begitu sebaliknya bahkan *oreng dere*den diidentikkan dengan *oreng nagera*. Di Pulau Kangean sendiri terjadi konstruksi yang sama yaitu orang yang berada di sekitar kekuasaan Arjesa diidentikkan dengan *oreng kotta* sedangkan yang berada di luar wilayah itu secara gradual disebut *oreng disa* bahkan orang kepulauan disebut *oreng polo*. Cara pandang ini yang menimbulkan kontroversi dalam pembangunan wilayah selalu terjadi di daratan sedangkan kepulauan sering menjadi marginal “*je’ ghun polo*” (hanya kepulauan).

### **Kangean bukan Epigon Madura**

Secara kultural, Pulau Kangean memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Madura di Sumenep daratan. Perbedaan itu nampak pada asal usul, konstruksi rumah, identitas, dan bahasa (Bustami, 2001). Asal usul orang Kangean berasal dari orang Madura, orang Bawean (Bebien), orang Cina, orang Arab, orang Banjar, orang Mandar, orang Bugis Makassar, orang Jawa, dan orang Bali. Konstruksi rumah terdiri dari rumah yang di dalamnya terdapat kolong (*roma pacenan*), rumah panggung (*roma dera’*), dan rumah tanpa kolong (*roma pegun*). Kedua rumah-roma pacenan dan roma dera’ dapurnya terletak di atas lantai bambu (palancak) sedangkan roma pegun di lantai. Bahasa Kangean mempunyai tingkatan bahasa yaitu rendah (*mapas*), menengah (*satengnga a besa*), dan tinggi (*alos*). Bahasa rendah dengan menggunakan *ako-ka*o, *eson-sede*,

*eson-kakeh*. Bahasa menengah menggunakan *nira-nae, die-dika*. Bahasa tinggi menggunakan *kaule-panjennengnan*.

Perbedaan itu berhubungan dengan interaksi dengan lingkungan mereka yang berbentuk kepulauan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Perbedaan kebudayaan ini belum disadari oleh pengambil kebijakan pembangunan sehingga pembangunan kepulauan selalu terjebak dalam cara pandang Madura yang berorientasi ke daratan. Dalam kasus penggunaan bahasa daerah Madura dalam kurikulum sekolah dasar beberapa siswa SD di Kangean mengalami kesulitan dan tidak lagi menguasai bahasa Kangean.

### **Pembangunan Wilayah**

Kangean memiliki hutan seluas 20.807 ha terdiri dari 7.233 ha kayu jati dan 13.754 ha hutan liar. Pada abad 19 di kawasan Madura dan Jawa bagian timur, kayu jati untuk bangunan didatangkan dari Kangean (Jonge, 1989: 10). Kayu jati di Kangean banyak yang ditebang dibawa ke Perum Perhutani di Sumenep bahkan sering terjadi pencurian. Istilah masyarakat Kangean untuk pencurian kayu "*satongtong e pentong, sapekol e tokol, samotor bisa e ator*" (mengambil sepotong dipuntung, mengambil sepikul dipukul, mengambil satu mobil bisa diatur). Masyarakat desa Kangajen, kampong Bondat, Tajungan, Kambeta yang sebelumnya belum pernah banjir sekarang menjadi langganan karena akar-akar kayu jati yang berfungsi sebagai penahan air telah tiada dan sumur-sumur mengalami kekeringan. Kayu-kayu jati Kangean dipakai sebagai bahan bangunan "istana" para pejabat di Sumenep daratan. Permasalahannya

terletak pada kompensasi atas eksploitasi hutan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat tidak dilakukan.

Pembangunan penampungan air di beberapa sumber mata air seperti di Kangajen Dera', Temor Jeng-jeng, Sabesomor, dan Pabien menimbulkan masalah. Kegagalan menentukan titik mata air, aliran air, penentuan bangunan mengakibatkan sumber mata air mengalami penyumbatan, air banyak yang mengalir ke laut dan bangunan menjadi tidak berguna. Masyarakat setempat tidak dilibatkan dan dianggap tidak tahu pembangunan mata air, padahal air dari sumber bisa ditampung dan dialirkan ke wilayah sekitar yang sering mengalami kesulitan air bersih. Pelaksanaan dilakukan oleh orang proyek yang ditunjuk oleh penguasa dengan mengacu pada keberhasilan di wilayah Sumenep daratan. Penentuan pembangunan lokasi instalasi sumur bor sering dipolitisir oleh para politisi dan pejabat di Sumenep daratan. Lokasi titik air menurut masyarakat adalah di desa Gelleman karena desakan dari atas dipindahkan ke Duko. Di desa Duko ternyata kandungan airnya sedikit tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk di beberapa desa sehingga dipindahkan ke Arjesa yang relatif lebih banyak kandungan airnya. Penduduk Duko berusaha mempertahankan dan timbul konflik. Di sisi lain, pembangunan jalan beraspal yang menghubungkan Arjesa dan Kangajen yang seharusnya dilaksanakan tiba-tiba dipindahkan ke desa Lombang (cemara udang) dengan alasan untuk meningkatkan arus pariwisata.

Ayam bekisar dari Kangean yang terkenal dengan keindahan bulu dan suaranya dijadikan maskot Jawa Timur dan berada di rumah-rumah pejabat di berbagai wilayah. Peternakan ayam ini saat ini mulai langka dan terancam punah

(asa) karena kesulitan mencari ayam hutan. Ayam hutan menjadi punah karena hutan sebagai habitatnya telah gundul. Kampong Cellong, desa Pajenangger sebelumnya terkenal sebagai penghasil nener tetapi dengan dibangunnya sarana jembatan yang tidak sesuai dengan aliran arus laut sehingga justru menghancurkan tambak-tambak yang ada. Masyarakat menginginkan pembangunan tanggul pengaman tetapi yang diberikan justru jembatan.

Di Pulau Kangean terdapat kandungan tambang minyak yang saat ini dieksploitasi oleh perusahaan minyak asing. Beberapa aktifis LSM mempunyai data tentang kandungan minyak dan meminta pembagian keuntungan atas eksploitasi tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana di Kangean setidaknya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang minimal. Ironisnya, yang terjadi adalah pembangunan yang setenga hati dengan alasan, yaitu di daratan biayanya lebih murah, bahan mudah didapatkan, ombak, dan kesulitan transportasi.

Beberapa warga yang berengalaman bekerja di luar negeri (Malasyia, Singapura, Brunei) sebagai TKI, tekong membandingkan kondisi sarana dan prasarana bangunan di Kangean dengan di Malasyia. Beberapa informan menyatakan bangunan di Kangean yang menelan biaya mahal ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan biaya lebih rendah dan hasilnya lebih bagus. Akumulasi kekecewaan itu terwujud dalam bentuk keinginan untuk mendirikan negara sendiri sehingga bebas mengelola sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain tuntutan untuk membangun dalam konteks

otonomi *oreng polo* menjadi suatu keharusan. Pilihan yang terakhir ini menjadi aspirasi sebagian besar *oreng polo*.

### **Kesimpulan**

Orang Pulau Kangean mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Madura harus dijadikan pertimbangan dalam pembangunan wilayah. Konstruksi hubungan antara daratan dan kepulauan yang menciptakan bias-bias budaya harus segera dicairkan dengan memberikan kebebasan bagi *oreng polo* untuk menentukan masa depannya sendiri. Pembangunan wilayah berorientasi pada tetap eksisnya otonomi kebudayaan lokal yang diungkapkan dengan “*a polong ta’ akompol, a pencar ta’ apesa*” (berkumpul tidak bersatu, berpencar tidak berpisah).

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Bustami, Abd. Latif  
2001 “*Sadeging*: Pandangan Orang Pulau Kangean tentang Penyembuhan Penyakit ISPA Pada Balita, Tesis Magister Sains dalam Antropologi, Jakarta: FISIP UI
- Suparlan, Parsudi  
1986 “Kebudayaan dan Pembangunan”, *Media IKA* 1986